



# Buletin Parlementaria

Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021



## Komisi III Berikan Bantuan Untuk Korban Banjir Kalsel



8 Komisi IV Dorong Pemerintah Reboisasi Area Hutan Gunung Mas



12 Subsidi Energi Harus Mudah Akses Kelompok Miskin



9 772614 339005



BULETIN

# Komisi III Berikan Bantuan Untuk Korban Banjir Kalsel



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat korban banjir di Banjar, Kalimantan Selatan. Foto: Jaka/Man

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI memberikan bantuan berupa 2000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari total bantuan tersebut, rencananya akan dibagi dan disalurkan untuk Kabupaten Banjar, Batola, dan Hulu Sungai Tengah.

“Bantuan ini adalah wujud kepedulian kami dari Komisi III DPR kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir ini. Dan bantuan ini adalah murni bersumber dari sumbangan Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR. Kami berharap bantuan tersebut bisa membantu meringankan masyarakat yang terpapar banjir,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat di Kabupaten Banjar, Kalsel, Kamis (4/2).

Legislator dapil Kalimantan Selatan I ini berharap, bantuan yang diberikan ini bisa menarik bantuan-bantuan lain yang akan datang lagi nantinya. Tidak lupa, ia juga memberikan *support* berupa semangat kepada masyarakat agar bisa

menghadapi cobaan ini.

“Yang penting hari ini masyarakat harus tetap semangat dan sehat. Kalau kita sehat, kita masih bisa berdoa bekerja dan ini sejatinya hanya cobaan. Sepanjang kita bisa dianugerahi oleh Allah SWT kesehatan, kita bisa terus berdoa mudah-mudahan kerugian akibat banjir bisa segera tergantikan,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengimbau, agar pemerintah juga harus tetap dalam kondisi *stand by* menyiapkan sarana & prasarana serta tata kelola untuk mengatasi banjir dan musibah lainnya, apalagi bencana ini terjadi di masa pandemi Covid-19 seperti ini.

“Padahal musibah pokok ini sebetulnya yang sedang dihadapi pandemi Covid-19, tapi musibah lain datang silih berganti, ada gempa di Sulawesi Barat dan beberapa musibah di daerah lainnya. Karena itu, dana *emergency* dan semua hal-hal yang menyangkut kepedulian dan hak-hak sosial rakyat, ini harus menjadi perhatian

penuh pemerintah,” imbuh legislator dapil Kalsel I ini.

Aboe Bakar menerangkan, saat ini mereka masih membutuhkan dukungan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai hal ini.

“Saya minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memberikan program dukungan baik logistik maupun kesehatan untuk menolong warga Kalsel yang tertimpa musibah. Secara khusus saya minta Kapolda Kalsel agar menerjunkan personelnnya guna membantu penanganan banjir ini, karena Polri adalah mitra kerja Komisi III yang memiliki personel terbesar dan memiliki visi melayani,” ucap politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Kunjungan Komisi III DPR RI ini selain diikuti beberapa Anggota Komisi III DPR RI, juga didampingi langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kapolda Kalsel Irjen. Pol. Rikwanto, Kajati Kalsel Rudi Prabowo Aji, Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto, serta pihak terkait lainnya. ■jka/mh



# Perayaan Natal Bersama, Puan: Parlemen Harus Bawa Pesan Persatuan

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani membuka acara puncak Perayaan Natal bersama MPR, DPR, dan DPD RI Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 digelar pada Kamis (28/1) sore. Acara digelar secara virtual dan dihadiri terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Ia mendorong parlemen untuk terus membawa pesan persatuan dan gotong royong kepada segenap rakyat Indonesia.

“Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita bisa hadir perayaan Natal MPR/DPR/DPD RI. Pertama saya ingin mengucapkan selamat perayaan Natal kepada seluruh umat Kristiani dan selamat tahun baru 2021 kepada kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh yang Maha Kuasa,” ucap Puan dalam sambutannya.

Puan mengatakan perayaan Natal kali ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pembatasan sosial di masa pandemi. “Saya masih ingat perayaan Natal tahun lalu dirayakan dengan kemeriahan, tapi tahun ini ada pandemi, maka kita perlu menahan diri dan merayakannya dengan kesederhanaan sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan kita untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Saya yakin, walaupun perayaan natal kali ini dilakukan dengan kesederhanaan, namun perayaan natal tetap membawa damai umat Kristiani yang turut dirasakan di seluruh Indonesia,” kata Puan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini terus mengingatkan untuk selalu menyuarakan pentingnya persatuan, kepada seluruh umat beragama. Dia berpesan agar kalangan agamawan jangan pernah lelah mengingatkan



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Eno/Man

umat beragama di Indonesia tentang pentingnya menerapkan nilai gotong-royong, yang merupakan intisari dari Pancasila dan bagian dari Indonesia.

“Persatuan adalah bagian dari DNA bangsa Indonesia, bagian dari jati diri kita, terutama bagi kita semua yang bekerja di Gedung Perwakilan Rakyat. Mari kita perkuat kesatuan kita di Gedung Senayan yang menjadi contoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kuat karena bersatu, bersatu karena kita kuat,” tandas Puan.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 MPR, DPR, dan DPD Willy Midel Yoseph mengatakan, perayaan Natal kali ini diisi dengan kegiatan sosial, webinar dialog antar umat beragama dan perayaan puncak ibadah Natal dan Tahun Baru.

Pelaksanaan aksi sosial sebagai rangkaian acara tersebut dengan pemberian bantuan logistik berupa bantuan paket sembako kepada jemaat yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Bantuan diberikan melalui perwakilan gereja-gereja di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. ■ ann/er



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos., Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

**FOTOGRAFER**  
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Armanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna,

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO**

**DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# DPT Masih Menjadi Sumber Masalah Penyelenggaraan Pemilu

**K**etua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebutkan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan sumber permasalahan yang klasik dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Permasalahan tersebut pun telah beberapa kali disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"DPT ini yang selalu menjadi persoalan dari Pemilu ke Pemilu dan ini klasik, saya bisa katakan ini adalah sumber masalahnya. DPT ini kan masalahnya ada di hilir atau daerah, ini masalahnya ada situ," tegas Doli usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Ketua Bawaslu RI, Sekretaris Jenderal KPU RI, Ketua Bawaslu Lampung, Ketua KPU Lampung, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Lampung, di Bandar Lampung, Rabu (3/2).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa pada rapat evaluasi bersama KPU dan Bawaslu ternyata di lapangan selain masalah konseptual pada data kependudukan, dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) di daerah tidak bisa secara otomatis menghapus data orang yang sudah meninggal dunia dari data kependudukannya. "Jadi, untuk menghapus data kependudukan harus keluarga yang bersangkutan yang melapor ke dinas. Saya pikir banyak warga yang belum tahu masalah ini," kata Doli.

Oleh karena itu, kata dia, ke depan tugas pemerintah, khususnya



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat bertukar cenderamata dengan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhathul Khoiriyah. Foto: Sofyan/Man

”

**ADA 130 SENGGKETA YANG TERDAFTAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI, JADI ARTINYA MASIH ADA PROBLEM. MASALAH INI TERJADI ATAU MUNCUL KARENA DIANGGAP ADA KECURANGAN DAN PENYIMPANGAN SERTA SEGALA MACAMNYA,**

Kemendagri, agar disdukcapil dapat lebih aktif dalam menata sistem dan bagaimana mensosialisasikan hal

tersebut kepada masyarakat. Namun, lanjut dia, secara umum pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang baru pertama kali dapat dikatakan sukses. Meskipun demikian, Komisi II DPR RI terus mencermati beberapa isu silang sengketa yang terjadi.

"Ada 130 sengketa yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi, jadi artinya masih ada problem. Masalah ini terjadi atau muncul karena dianggap ada kecurangan dan penyimpangan serta segala macamnya," ujarnya. Terakhir yang harus dicermati adalah koordinasi antarlembaga Pemilu yang terkadang terjadi konflik satu sama lain. Menurut Doli, hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena akan menjadi kontraproduktif pada pertumbuhan Pilkada ke depannya. ■ sf

# Evaluasi Pilkada di Banten, Data e-KTP Masih Menjadi Momok

**E**valuasi Pilkada 2020 menjadi salah satu bentuk fungsi tugas pengawasan dari Komisi II DPR RI. Dari Kunjungan Kerja Spesifik ke Banten, Komisi II DPR RI menemukan banyak poin yang wajib dievaluasi guna menciptakan Pemilu yang lebih berkualitas. Salah satu poinnya adalah *database* e-KTP yang masih berantakan, sehingga menyulitkan penyelenggara menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal tersebut diutarakan Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat saat pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri, serta KPUD dan Bawaslu se-Provinsi Banten di Cilegon, Banten, Rabu (3/2). Menurutnya, data e-KTP yang tidak terekam dengan baik pada akhirnya

menjadi momok masalah yang harus segera diselesaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Data e-KTP ini harus betul-betul valid, dan harus selesai paling tidak tahun 2021 harus selesai semuanya. Dan tidak ada lagi yang ganda seperti itu. Kenapa? Karena ini sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih baik di Pemilu maupun di Pilkada. Setiap acara Pilkada, Kemendagri pasti selalu kedodoran tentang masalah e-KTP,” terang Djarot.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah e-KTP ini akan dapat meningkatkan kualitas Pemilu Indonesia di masa depan.

Sebab sistem yang baik pada perekaman e-KTP menjadi langkah awal pemerintah untuk melangkah lebih jauh menyelenggarakan pemilu dengan sistem elektronik.

”

**DATA E-KTP INI HARUS BETUL-BETUL VALID, DAN HARUS SELESAI PALING TIDAK TAHUN 2021 HARUS SELESAI SEMUANYA. DAN TIDAK ADA LAGI YANG GANDA SEPERTI ITU.**

“Karena kita bisa gunakan sistem misalnya e-rekap. Bahkan mungkin juga melakukan pola Pemilu kita dengan sistem *hybrid*, *e-voting* maupun manual. Bisa sebetulnya dengan teknologi. Ini yang saya maksud adalah peningkatan kualitas. Dengan kemajuan teknologi tentunya ini harus kita pikirkan bersama,” tutur Djarot.

Maka dari itu, menurut politisi dapil Sumatera Utara III tersebut, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi sangat penting guna peningkatan kualitas Pemilu. “Supaya setiap 5 tahun sekali seperti ini bukan secara seremonial saja, tapi ada peningkatan kualitas kita sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baik eksekutif maupun legislatif yang betul-betul berkualitas, berkarakter, berintegritas untuk memajukan bangsa dan negara ini,” tukas Djarot.

■ er/es



Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat. Foto: Erlangga/Man

# Komisi I Apresiasi Dukungan Kodam Siliwangi terhadap Penanganan Covid-19

**K**omisi I DPR RI mengapresiasi kesiapan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19, mulai dari penanganan memutus penyebaran virus, pengamanan pendistribusian vaksin dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menuju PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, hingga pendistribusian vaksin Covid-19 dari Bio Farma menuju ke daerah-daerah.

“Kodam III/Siliwangi merupakan salah satu Kodam terbesar di Jawa Barat. Kami (Komisi I DPR) mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pangdam III/Siliwangi

”

**KAMI JUGA MENGAPRESIASI KODAM III/SILIWANGI YANG TELAH MAMPU BERSINERGI DENGAN BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA) UNTUK MENSOSIALISASIKAN VAKSIN COVID-19 KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMBERIKAN PENGETAHUAN BAHWA VAKSIN INI ADALAH PENTING DAN TIDAK BERBAHAYA**

Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto beserta jajarannya. (Upaya) Ini sangat bagus, hanya saja anggaran yang perlu lebih didukung,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto beserta jajaran di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/1).

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, pihaknya ingin mendukung untuk lebih mendapat anggaran terutama untuk melawan Covid-19. Pasalnya Jawa Barat merupakan penduduk terbanyak di Republik Indonesia. Komisi I DPR RI juga akan mendorong pemerintah pusat untuk menyiapkan dana cadangan guna melawan Covid-19.

“Kami juga mengapresiasi Kodam III/Siliwangi yang telah mampu bersinergi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mensosialisasikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat dalam rangka memberikan pengetahuan bahwa vaksin ini adalah penting dan tidak berbahaya,” tambah politisi dapil Jawa Tengah VII itu.

Di samping itu, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengapresiasi kunjungan yang luar biasa dari Komisi I DPR RI. “Kami telah sampaikan semua apa yang telah kami lakukan dan kami menerima banyak saran dan masukan dari Komisi I DPR untuk meningkatkan kinerja kami dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19,” kata Nugroho kepada Komisi I. ■ cas/sf

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Foto: Chasbi/Man



# Komisi IV Temukan Sejumlah Permasalahan di PIM Palembang

**K**omisi IV DPR RI menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi di Pasar Ikan Modern (PIM) Kota Palembang, Sumatera Selatan. Permasalahan pertama yang terlihat, jelas Ketua Komisi IV DPR RI Sudin adalah sistem pembuangan limbah yang tidak berfungsi, sehingga air menggenangi pasar, bahkan cenderung banjir, serta menimbulkan bau yang tidak sedap.

“Kami sebelumnya memang mendengar beberapa keluhan terkait Pasar Ikan Modern ini, dan kami sengaja datang ke lokasi untuk mengetahui kebenarannya, sekaligus bersama-sama instansi terkait mencari solusinya,” kata Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi PIM Palembang, Sumsel, Kamis (28/1).

Politisi PDI-Perjuangan itu menduga, permasalahan genangan air tersebut terjadi akibat tinggi saluran air limbah yang terlalu kecil, hanya kurang lebih 10 sentimeter saja. Iya meyakini jika hal itu diperbesar menjadi 30-40 sentimeter lagi, maka tidak akan ada lagi genangan air.

Selain itu juga kolam retensi yang berada di belakang PIM, memang terlihat tidak memadai dan tidak sebanding dengan untuk menyerap sisa pembuangan limbah yang dibuang para pedagang. Sejatinya menurut Sudin, saluran dan kolam pembuangan limbah itu disesuaikan dengan air yang dibuang. Artinya, jumlah kubik air yang dibuang ke selokan dan kapasitas kolam itu harus dihitung.

“Tidak hanya itu, kami juga melihat



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengunjungi Pasar Ikan Modern Palembang, Sumsel. Foto: Ayu/Man

pasar sebesar ini pedagangnya hanya beberapa orang saja. Pihak pengelola mengatakan awalnya jumlah pedagang yang tercatat sekitar 154 orang. Namun belakangan berkurang dan berkurang terus hingga menjadi hanya sekitar 20-an pedagang yang masih menempati pasar tersebut. Ini tentu sangat disayangkan. Perlu usaha atau *trigger* agar para pedagang mau kembali berdagang di pasar ikan modern tersebut,” papar Sudin.

Ia memberi masukan kepada pengelola untuk menggratiskan iuran selama beberapa bulan kepada pedagang yang ingin berjualan di pasar ikan modern tersebut. Namun setelah itu, tentu para pedagang

harus kembali membayar iuran untuk pengelolaan pasar, seperti membayar listrik, iuran kebersihan dan keamanan. Itupun menurut Sudin harus dipastikan ketersediaan listriknya. Pasalnya, saat ini pun listrik di PIM tersebut masih padam dan tidak tersedia *genset*.

“Intinya, kami berharap agar Pemerintah Kota Palembang segera memperbaiki tata kelola pasar ikan modern ini, yang pembangunannya tentu memakan biaya dan anggaran yang tidak sedikit, karena pasar ikan modern ini sudah diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pemkot Palembang,” tegas legislator dapil Lampung I itu. ■ ayu/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin Kunpek Komisi IV DPR RI meninjau PTPN di kawasan Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat. Foto : Azka/Man

# Komisi IV Desak Reboisasi Area Hutan Gunung Mas

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai penyebab terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Bogor disebabkan adanya pengalihfungsian lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung Mas. Untuk itu ia mendesak pemerintah setempat dan PTPN melakukan reboisasi terhadap area tersebut.

Hal tersebut disampaikan Dedi usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). Menurutnya ada kesalahan ketika hutan Gunung Mas dialihfungsikan menjadi rumah-rumah *bedeng* para pekerja dan perkebunan.

“Harusnya area hutan tidak boleh dialihfungsikan sebagai kawasan pemukiman, itu akan menyebabkan

hilangnya pohon-pohon besar dan juga batu yang berada di aliran sungai tidak bisa menahan air yang turun dari atas. Jangan sampai menyalahkan hujannya. Tetapi kita harus sadar diri bahwa area tersebut merupakan area hutan, bukan untuk tempat tinggal,” jelasnya.

Politisi Partai Golongan Karya tersebut pun memberikan solusi agar area tersebut ditanam kembali dengan pohon-pohon yang berfungsi sebagai penahan air (reboisasi). Serta melakukan realokasi penduduk yang tinggal di area tersebut, agar nantinya kawasan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kami dari Komisi IV memberikan beberapa solusi yang berharap nantinya agar tidak menimbulkan terjadinya bencana seperti ini lagi. Dan juga kami meminta agar penduduk yang tinggal di area tersebut direlokasi ke tempat yang

lebih nyaman dan layak,” ujar Kang Dedi, sapaan akrabnya.

Politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII ini juga meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh hutan di wilayah Kabupaten Bogor. Ia mendorong pihak terkait untuk meneliti jumlah hutan di Bogor, sehingga apabila jumlahnya berkurang, maka sejumlah perkebunan yang kurang produktif dan tidak menguntungkan itu statusnya diubah menjadi hutan.

“Perkebunan teh sudah banyak yang tidak menguntungkan di bibir hutan. Saya sarankan perkebunan (teh) itu sebagian diubah peruntukannya dijadikan hutan lindung. Gunung Mas semuanya dihutankan kembali, kecuali beberapa perkebunan yang relatif masih produktif dan menguntungkan,” tutup mantan Bupati Purwakarta itu. ■ azk/er



# Komisi IV Dorong Revisi Permentan Guna Atasi Kelangkaan Pupuk

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin menekankan Komisi IV DPR RI akan segera mengusulkan adanya revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang pupuk bersubsidi. Hasan mengungkapkan, usulan revisi Permentan itu dalam rangka menyikapi persoalan kelangkaan pupuk yang masih terjadi hingga saat ini.

Penegasan tersebut disampaikan Hasan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Kamis (28/1). Hadir dalam pertemuan, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy dan perwakilan Gapoktan Gresik.

“Alokasi pupuk bersubsidi di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi petani miskin yang memiliki lahan maksimal 1 hektar. Komisi IV berharap, melalui usulan revisi Permentan ini, para petani kaya tidak akan mengambil jatah pupuk bersubsidi. Sehingga, kelangkaan pupuk bagi petani miskin juga tidak akan terjadi,” ujar Hasan.

Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut menyatakan pihaknya akan mengusulkan adanya perubahan khusus tentang klausul penerima pupuk bersubsidi. “Yakni, dari awalnya bagi petani yang memiliki minimal lahan 2 hektar menjadi maksimal 1 hektar. Tujuannya, agar penerima benar-benar petani yang miskin,” tandas Hasan.

Sementara itu, Dirut PT Petrokimia



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Foto : Puntho/Man



**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI INDONESIA BELUM MEMENUHI RASA KEADILAN KHUSUSNYA BAGI PETANI MISKIN LAHAN MAKSIMAL 1 HEKTAR.**

Gresik Dwi Satriyo Annurogo menjelaskan Petrokimia telah menyalurkan pupuk bersubsidi

sebesar 4,9 juta ton atau lebih dari 54 persen pupuk bersubsidi nasional. “Selain itu, kami mengedukasi petani dengan pemupukan 5:3:2 NPK Phonska Plus. Maka, diharapkan mampu mengurangi ketergantungan petani akan pupuk bersubsidi,” jelas Satriyo kepada Komisi IV DPR RI.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia Gresik tersebut antara lain Anggota Komisi IV DPR RI Vita Ervina (Fraksi PDI Perjuangan), Alien Mus (Fraksi Golkar), Charles Meikyansyah (Fraksi Nasdem), Muhtarom, Luluk Nur Hamidah (Fraksi PKB), Bambang Purwanto (Fraksi Demokrat), dan Slamet Ariyadi (Fraksi PAN). ■ pun/er

# PT PI Belum Mampu Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

**P**T Pupuk Indonesia (PT PI) ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Ada sekitar 9 juta ton kebutuhan pupuk nasional yang belum mampu diproduksi oleh Pupuk Indonesia, baik pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi.

Hal ini mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan PT PI di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (28/1). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan, kapasitas produksi PT PI masih terbatas. Rencananya, PT PI akan membangun pabrik baru di beberapa daerah untuk meningkatkan produksinya.

“Kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia masih di bawah kebutuhan pupuk nasional. Kita perlu tahu langkah apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, baik subsidi maupun non-subsidi. Kalau mau bangun pabrik baru, agar direncanakan dan diputuskan di Komisi VI. Saat ini, jarak antara produksi dan kebutuhan pupuk nasional sekitar 9 juta ton. Ini harus dipecahkan,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.

Dikatakannya, masalah pupuk merupakan masalah lintas sektoral. Untuk itu, semua pihak perlu duduk bersama menyelesaikan isu pupuk. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel beberapa waktu yang lalu sudah menyerukan agar semua Komisi di DPR RI yang terkait pupuk bisa duduk bersama mencari solusi. Semua komisi di DPR RI yang terlibat masalah pupuk bisa mengawal masalah ini agar segera teratasi.

Pada bagian lain, Martin menambahkan soal kartu tani yang ternyata tidak semua petani

memilikinya. Ini tentu menyulitkan para petani mengakses bantuan pemerintah termasuk pupuk subsidi. Kartu tani, sejak awal diterbitkan masih bermasalah,

lantaran infrastrukturnya belum tersedia dengan baik. “Edukasi ke petani juga masih kurang, sehingga petani cenderung tak mau gunakan kartu tani. Padahal, kartu tani sangat penting untuk data petani,” tandas Martin.

Dengan kartu tani, sambungnya, PT PI juga mudah mendistribusikan pupuk subsidi kepada para petani yang membutuhkan. Selama ini distribusi pupuk ke para petani masih manual. Kartu tani akan memperjelas data jumlah petani di Indonesia. Ini berpengaruh juga pada perusahaan BUMN bidang pertanian dalam meningkatkan kapasitas produksinya. ■ mh/er

”

**KAPASITAS PRODUKSI PT PUPUK INDONESIA MASIH DI BAWAH KEBUTUHAN PUPUK NASIONAL. KITA PERLU TAHU LANGKAH APA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PUPUK NASIONAL, BAIK SUBSIDI MAUPUN NON-SUBSIDI. KALAU MAU BANGUN PABRIK BARU, AGAR DIRENCANAKAN DAN DIPUTUSKAN DI KOMISI VI.**

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Husen/Man



# Alami *Oversupply*, Industri Semen Butuh Dukungan Kebijakan

**P**T Semen Indonesia merupakan salah satu industri strategis Indonesia yang menguasai pasar saham lebih dari 53 persen. Namun dengan kelebihan produksi hingga mencapai 60-70 ton, serta berkurangnya penjualan di masa pandemi membuat industri tersebut terancam. Hal ini membuat kebijakan strategis dari para pemangku kepentingan dan DPR RI menjadi sangat penting.

Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih kepada **Parlementaria** usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan dengan jajaran direksi PT Semen Indonesia dan anak perusahaannya PT SBI di Narogong, Jawa Barat, Kamis (28/1). Ia mengaku akan melanjutkan pembahasan masalah ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah.

“Karena masih adanya *oversupply*, maka diharapkan untuk membatasi berdirinya pabrik semen baru. Nah ini tentu akan menjadi kebijakan-kebijakan bagi kami dalam Raker, baik dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan termasuk juga dengan Kepala BKPM. Sehingga kami harapkan Semen Indonesia nanti tetap bisa hidup, bisa bersaing di Indonesia,” jelas Demer, sapaan akrabnya.

Demer menjelaskan permasalahan *oversupply* ini harus diantisipasi segera, agar tidak masuk ke dalam persoalan yang lebih besar lagi. Menurutnya harus ada penelitian lebih lanjut guna mengetahui kapasitas semen nasional sehingga dapat



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bertukar cenderamata dengan direksi PT Semen Indonesia. Foto: Erlangga/Man

menyeimbangkan dengan pertumbuhan industri Indonesia.

“Ya kebutuhan nasional kita dengan kapasitas nasional juga tidak seimbang dimana pertumbuhan industri juga cukup besar, bisa bangkrut juga Semen Indonesia ini ke depan. Tentu ada perlu kehati-hatian kita terhadap masa depan Semen Indonesia. Untuk itu harus segera kita bahas,” ucap politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Senada dengan Demer, Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar mengatakan agar pembangunan pabrik semen asal Tiongkok dimoratorium, karena tidak memberikan profit

signifikan bagi pembangunan di Indonesia. Menurutnya kementerian harus memaparkan fakta yang terjadi di lapangan kepada Presiden, sehingga ada keputusan yang bisa diambil.

“Mereka dalam membangun pabrik, mereka hanya memindahkan pabrik yang dari luar ke Indonesia. Sehingga biaya konstruksi mereka jauh lebih rendah, sementara kita hari ini masih melakukan semacam *recovery* biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Sehingga ada beban terhadap biaya investasi. Harus ada keputusan dari pemerintah,” tandas politisi Fraksi PAN itu. ■ **er/sf**

# Konversikan Bulog jadi **Badan Pangan Nasional**

**A**nggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa Indonesia sudah saatnya memiliki Badan Pangan Nasional seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Untuk itu ia mengusulkan agar keberadaan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) segera dikonversikan menjadi Badan Pangan Nasional.

“Perintah Undang-Undang Pangan, kita harus segera memiliki Badan Pangan Nasional. Daripada membuat badan baru, sebetulnya (Bulog) ini dikonversikan saja untuk menjadi Badan Pangan Nasional,” ucap Rieke di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Gudang Bulog di kawasan Karawang, Jawa Barat, Kamis (28/1).

Sehingga dalam kondisi yang tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, sambung Rieke, Indonesia wajib memiliki satu Badan Pangan Nasional yang keberadaannya benar-benar langsung di bawah Presiden.

“Karena soal pangan adalah soal keselamatan negara, selain masalah energi yang juga penting. Dalam era globalisasi dan pasar bebas, yang benar-benar skala prioritasnya harus dijaga adalah tentang pangan,” tandas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VI DPR ke Gudang Bulog Karawang tersebut, para wakil rakyat menyaksikan secara langsung masih banyaknya tumpukan beras hasil impor beberapa tahun lalu yang belum tersalurkan ke masyarakat atau pasar.

“Kita berharap ke depannya ada strategi bagi kedaulatan pangan kita. Beras-beras yang ada ini tidak tersalurkan. Kami yakin beras hasil petani kita jauh lebih baik dari beras



Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto: Devi/Man

impor, namun yang terpenting adalah adanya *support* dari semua pihak, termasuk DPR dan pemerintah agar bagaimana produksi dan distribusinya beras yang dihasilkan para petani itu diberikan ruang. Saya yakin, kita tidak usah impor, khususnya soal beras,” tegas Rieke.

”

**PERINTAH UNDANG-UNDANG PANGAN, KITA HARUS SEGERA MEMILIKI BADAN PANGAN NASIONAL. DARIPADA MEMBUAT BADAN BARU, SEBETULNYA (BULOG) INI DIKONVERSIKAN SAJA UNTUK MENJADI BADAN PANGAN NASIONAL**

Terkait penumpukan beras impor di Gudang Bulog tersebut, Rieke mengatakan, permasalahan ini akan dibawa ke rapat Komisi VI DPR RI. Ia juga menyebut bahwa kondisi keuangan Bulog juga kurang sehat, akibat adanya kebijakan bahwa Bulog harus mengimpor. Sedangkan uang untuk melakukan impornya berasal dari pinjaman perbankan. Hingga akhirnya Bulog harus membayar bunga utang yang jumlahnya mencapai Rp1,4 triliun.

Sementara di sisi lain Bulog juga harus bisa mengatur harga pangan yang murah, yang menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, kurang masuk akal. “Karena itu saya tidak berhenti mengusulkan, sudah waktunya Bulog menjadi Badan Pangan Nasional yang tidak boleh *profit oriented*, dan dia tidak boleh dipaksa untuk menghasilkan untung, tetapi bagaimana badan pangan itu betul-betul bisa menjaga ketersediaan, keamanan, dan kedaulatan pangan kita,” pungkasnya. ■ dep/es

# Studi Kelayakan Pembangunan *Smelter* Freeport Harus Libatkan Banyak Pihak

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin mengatakan studi kelayakan (FS) pembangunan *Smelter* PT Freeport Indonesia di Gresik perlu melibatkan berbagai macam pihak dalam penyelesaiannya, karena masing-masing pihak masih ada silang pendapat terhadap progres pembangunan *smelter*. Terbukti dengan progres pembangunan *smelter* masih diangka 6 persen, padahal sudah dimulai sejak 2018 dan direncanakan selesai tahun 2023.

“Dari hasil pembicaraan antara Anggota DPR dapil Papua, Dirjen Minerba dan pihak Freeport *bikin* saya bingung, terlihat sekali bahwa *feasibility studies* kita tidak bagus dan tidak terencana dengan benar. Mari kita buat FS-nya yang diikuti oleh berbagai macam pihak, sehingga semua pihak bisa terima,” kata Alex saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengunjungi PT Smelting Gresik di Jawa Timur, Kamis (28/1).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, mandeknya progres pembangunan *smelter* Freeport juga disebabkan karena adanya efek pandemi. Meskipun demikian, pihak-pihak yang bersinggungan dengan pembangunan *smelter* itu, harus tetap berkomitmen proyek ini akan selesai sesuai perjanjian dengan pemerintah yang menargetkan bisa beroperasi pada kuartal IV 2023.

Pada kesempatan itu, Vice President Hubungan Pemerintah dan Pengembangan Smelter Harry Panca Sakti menyatakan, progres



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin memimpin Tim Kunspek ke PT Smelting Gresik. Foto: Jaka/Man

pembangunan *smelter* masih *on the track*, dan lebih baik progresnya saat pihaknya melaporkan kepada pemerintah pada Januari 2020. Progres pencapaian masih 6 persen karena terdampak pandemi Covid-19, yang membuat pasokan bahan baku pembangunan *smelter* dari Kanada, Finlandia, maupun Jepang terhambat.

“Kita sudah sampaikan kepada pemerintah rencana lain yang mengakomodir karena terdampak pandemi, sekaligus memitigasi. Sebetulnya keuntungan itu ditambang, bukannya di *smelter*. Karena investasi yang dikeluarkan untuk bangun *smelter* itu membutuhkan investasi hingga 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp52 triliun, sedangkan potensi profit cuma 5-10 persen. Jadi kalau bangunnya pinjam *duit* dari bank, ini memang proyek yang tidak bagus,” jelasnya.

Di sisi lain, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, pihaknya

sedang mengevaluasi karena biaya untuk membangun *smelter* tidak sampai 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp52 triliun seperti yang dikatakan pihak Freeport. Dengan teknologi yang sama, menurutnya biaya pembangunan *smelter* bisa lebih murah.

“Tentunya evaluasi ini kami libatkan Freeport serta para pakar, mudah-mudahan nanti biayanya akan lebih murah. Karena kalau murah, kan Freeport juga senang, biaya bisa ditekan. Kemudian Freeport mengatakan dengan membangun *smelter*, Freeport akan tekor Rp300 juta per tahun akan juga kami evaluasi, tapi rasanya kalau sampai rugi, *smelter* di dunia akan tutup,” terangnya.

Selain itu, perlu diketahui bersama, penjualan tahun 2020 PT Freeport Indonesia mencapai sekitar 3,4 miliar dolar AS. Jikaseandainya Freeport ingin membangun *smelter* dengan nilai 3 miliar dolar AS, setahun saja mestinya bisa selesai. ■ jk/es

# SP BBS Pertamina EP Asset 3 Bisa Menjadi Percontohan Pengelolaan Sumur Tua



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan jajaran Pertamina EP Asset 3 dan mitra kerja terkait. Foto: Sofyan/Man

**B** Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto menilai SP BBS Pertamina EP Asset 3 Subang di Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat bisa menjadi percontohan untuk pengelolaan sumur-sumur tua milik Pertamina. Menurutnya, kendati terlihat kecil, namun kinerja SP BBS Pertamina EP Asset 3 cukup bagus.

“Walaupun terlihat kecil, namun bagus, ini bisa menjadi *role model* bagi pengelolaan sumur-sumur lama. Kedatangan kita ke sini di samping memberikan apresiasi, kita ingin temukan itu kenapa. Agar cita-cita 1 juta barel per hari untuk minyak

benar-benar bisa diwujudkan,” kata Bambang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Direksi PT Pertamina, Dirut PT Pertamina EP, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang di Karawang, Jabar, Kamis (28/1).

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, Karawang merupakan daerah yang bisa ditingkatkan *lifting* migasnya, dengan adanya intervensi teknologi pengeboran, atau dengan cara-cara baru. Walaupun kenaikannya tidak banyak, Bambang menilai dengan kenaikan hanya 500 giga untuk sumur tua sudah bagus. Kenaikan gas

sebesar 3,21 MMSCFD atau sekitar 45 Mega Watt untuk kenaikan pembangkit dinilainya sudah sangat besar.

Di sisi lain, saat pandemi Covid-19 ini Bambang menilai tidak ada penurunan produksi migas yang tidak signifikan. “Tidak terlalu banyak penurunan (produksi). Kan ini masalah teknologi. Yang susah itu ketika mengambil cadangan (minyak), tanah ribuan meter apalagi di laut. Energi ini sangat penting, kedua penting setelah pangan,” tandas Bambang sembari menambahkan, Komisi VII DPR RI mengapresiasi produksi migas SP BBS Pertamina EP Asset 3 Subang, dan mendorong agar produksi migas terus ditingkatkan. ■ sf

# Pengembangan PLTP Kamojang Perlu Ditingkatkan



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan direksi PT Indonesia Power PLTP Kamojang. Foto: Gerald/Man

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan bahwa pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Karena itu, pengembangan panas bumi mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian di wilayah sekitar potensi panas bumi.

Ramson mengungkapkan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen EBTKE KESDM, Direksi PLN, Direktur Utama PT Indonesia Power, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energi dan Kadis ESDM

”

**POIN YANG PALING PENTING ADALAH PENINGKATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI INI YANG HARUS TERUS DITINGKATKAN. KARENA POTENSI PANAS BUMI DI INDONESIA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK ITU SEKITAR 20.000 MW, TAPI YANG DIOLAH BARU SEKITAR 2.000 MW. NAH INI MASIH ADA PELUANG YANG SANGAT BESAR UNTUK TERUS DITINGKATKAN**

Jawa Barat, di PT Indonesia Power PLTP Kamojang, Bandung, Jabar, Kamis (28/1).

“Poin yang paling penting adalah peningkatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ini yang harus terus ditingkatkan. Karena potensi panas bumi di Indonesia untuk pembangkit listrik itu sekitar 20.000 MW, tapi yang diolah baru sekitar 2.000 MW. Nah ini masih ada peluang yang sangat besar untuk terus ditingkatkan,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Ramson mengatakan potensi pengembangan PLTP Kamojang sudah cukup baik dan dinilai sebagai energi yang bersih. Mengingat, PLTP Kamojang menjadi salah satu potensi panas bumi yang besar di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan dari Kunspek ini pihaknya juga menyerap aspirasi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses perancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Karenanya, melalui Kunspek ini, Eddy berharap dapat mengetahui secara langsung kendala maupun hambatan yang sangat berguna dalam memproses RUU EBT agar lebih sempurna.

“Kami (Komisi VII DPR RI) juga minta kepada Direktorat Jenderal EBTKE dan Kementerian ESDM agar dapat membuat suatu standar dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), sehingga jika standar teknologi tersebut dilaksanakan, tidak akan berdampak kepada masyarakat,” pesan politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu. ■ *opi/sf*

# Penerapan PJJ di Sukabumi Terkendala Infrastruktur Pendukung Akses Internet



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik komisi X DPR RI ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Foto: Alfi/Man

Situasi pandemi yang tak kunjung berakhir memaksa sejumlah sekolah untuk terus tetap melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun kenyataannya, sebagian besar lembaga pendidikan belum semua siap menggunakan skema daring tersebut. Sejumlah faktor penyebabnya antara lain belum meratanya akses internet, terbatasnya SDM, hingga ketersediaan fasilitas baik sarana dan prasarana IT.

Untuk itu, Komisi X DPR RI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (29/1). Lawatan tersebut bermaksud untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi

kebijakan tersebut dilakukan, serta guna menjangkau data dan aspirasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

“Pembelajaran jarak jauh ini ternyata masih ada masalah terkait sinyal. Banyak daerah-daerah, seperti di Kabupaten Sukabumi bagian selatan, masih banyak *blank spot* wilayah tersebut tidak bisa melakukan PJJ. Perlu dukungan dari Kominfo atau *provider* telekomunikasi untuk menambah tower-tower tertentu. Ini tidak boleh berfikir secara bisnis, tetapi bagaimana menyelamatkan generasi dan anak-anak kita untuk bisa tetap belajar,” kata Dede.

Tepat tidaknya sasaran dari program bantuan kuota data internet, kemudian menjadi persoalan selanjutnya. Politisi Partai Demokrat itu mengungkap bahwa dari kuota yang diberikan pemerintah, masih terdapat daerah yang 60 persen pelajarnya masih belum bisa mendapatkan jatah kuota. Padahal

Oktober 2020 lalu, Kemendikbud telah menerbitkan kebijakan Program Bantuan Kuota Internet Tahun 2020 dengan anggaran mencapai Rp7,2 triliun, meski kebijakan ini sempat menuai pro kontra dari masyarakat dan pelaku pendidikan.

“Masih banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan kuota internet gratis, ini menjadi tanda tanya, selama ini apakah data Dapodik itu benar-benar digunakan atau tidak. Sebab kenyataannya hanya 40 persen yang menerima, sisanya tidak menerima. Inilah fungsinya kita harus memiliki data faktual yang akurat,” kata legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Dede menambahkan, Komisi X DPR RI mendorong tenaga pengajar dan pendidik untuk memiliki satu kualifikasi dan kompetensi. Sehingga, keberadaan asesmen nasional dan guru penggerak dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi itu sendiri. Sayangnya ketika berbicara peningkatan kompetensi, ujung-ujungnya berkelindan pada persoalan jenjang karier tenaga guru honorer. Padahal menurutnya jenjang karier tidak melulu harus jadi PNS, tetapi kesejahteraan yang sama juga terdapat pada PPPK.

“*Mindset* ini harus dirubah, sehingga pendidik merasa nyaman mengajar dan barulah kemudian kita bisa bicara infrastruktur. Tahapan ini tidak bisa selesai 2-3 tahun. Ini membutuhkan *range* waktu yang panjang. Itu sebabnya saat ini sedang dilakukan (penyusunan) Peta Jalan Pendidikan, untuk merubah UU Sisdiknas. Harus dimulai pada peta jalan pendidikan dulu,” pungkasnya. ■ **alw/sf**



# Komisi X DPR Ingin Kabupaten Batang Dapat Program CoE SMK di 2021

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan sepanjang tahun

2020, Kabupaten Batang tidak memperoleh bantuan program pusat keunggulan Center of Excellence (CoE) SMK yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, Kabupaten Batang ke depannya akan menjadi salah satu pusat industri.

“Kemendikbud akan menggulirkan pusat keunggulan SMK, dan ternyata di Kabupaten Batang kosong, pada tahun 2020 tidak mendapatkan bantuan. Walaupun hanya 29 SMK yang mendapatkan bantuan, seharusnya daerah-daerah seperti Kabupaten Batang mendapat perhatian apalagi kedepan Batang akan menjadi daerah industri,” ujar Fikri di Pendopo Kantor Bupati Batang, Jumat (29/1).

Fikri menambahkan, di Jawa Tengah terdapat beberapa kawasan industri, seperti di sebagian Kabupaten Brebes, sebagian Kabupaten Kendal, dan yang terbesar ada di Kabupaten Batang. “Batang ini akan menjadi daerah industri yang besar, di sini ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan seterusnya. Oleh karenanya Kemendikbud harus memperhatikan terhadap daerah-daerah seperti Kabupaten Batang,” ungkapnya.

Fikri juga sampaikan, pada tahun 2021 ada peluang program CoE hingga 500 sekolah, sehingga kalau ada 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka kalau Kabupaten/Kota hanya dapat satu-satu, Kabupaten Batang harus salah satu yang menerimanya.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Foto: Singgih/Man

“Asalkan ada persyaratan yang dipenuhi, seperti SMK tersebut harus memiliki dua guru tersertifikasi industri dan kepala sekolah yang telah memperoleh pelatihan di dunia industri. Apalagi Batang akan menjadi daerah industri tentu ini kan lebih mempermudah,” ujar Fikri.

“Paling tidak diawal ini, Batang sudah harus ada dua SMK yang memperoleh bantuan program CoE dengan besaran bantuan Rp1,6 hingga Rp5,5 miliar. Ini sudah menjadi komitmen dan tadi juga dihadiri perwakilan Kemendikbud sehingga aspirasi ini nanti disampaikan

agar Batang mendapat bantuan CoE,” ujar politisi PKS itu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan kunjungan Komisi X DPR RI ini akan berpengaruh baik bagi para guru, karena dapat menjadi sarana untuk mengutarakan aspirasi mereka. “Tadi juga sudah disampaikan akan ada bantuan untuk SMK. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya dengan kunjungan Komisi X ke Kabupaten Batang,” harap Suyono kepada Tim Kunspek Komisi X DPR RI. ■ skr/es

# Pandemi Covid-19 Beri Dampak Mendalam Bagi Dunia Pendidikan

**S**ejak akhir Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Meski tidak sepenuhnya siap, kebijakan ini pun dipatuhi oleh institusi pendidikan di pelosok negeri.

Saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan *stakeholder* bidang pendidikan Kota Cilegon, Jumat (29/1), Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengatakan efek pandemi Covid-19 kepada dunia pendidikan sangat dalam, karena proses pembelajaran tatap muka sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, masih belum dibolehkan.

“Pendidikan itu dalam rangka dua hal pertama dalam pembentukan karakter, akhlak dan sebagainya. Kemudian pendidikan dan (ilmu) pengetahuan. Mungkin ilmu relatif bisa diperoleh melalui daring. Tetapi bagaimana pembentukan etika, pembentukan akhlak, keteladanan, itu hilang semua dengan pendidikan yang pakai jarak jauh itu. Nah ini yang menjadi masalah,” papar Mujib.

Ia menambahkan, banyak orang tua yang kebingungan karena harus mendampingi anaknya mengikuti PJJ. “Orang tuanya belum tentu mengerti, bagaimana ia bisa mendampingi anaknya sedangkan dia tidak tidak punya pengalaman mendidik. Belum lagi kalau kedua orang tuanya masih aktif bekerja. Inikan jadi permasalahan tersendiri,” ujarnya.

Terkait bantuan kuota internet yang dikucurkan pemerintah kepada

tenaga pendidik juga siswa sekolah, Mujib mengakui, bantuan tersebut sangat membantu. Namun, aksesnya, termasuk di Cilegon sendiri, masih banyak yang bermasalah. Hal ini dikarenakan ada beberapa daerah, infrastruktur telekomunikasinya belum memadai. “Ini baru di Cilegon, masih di Pulau Jawa. Bagaimana di Sumatera, Kalimantan serta di Indonesia Timur sana,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini berharap agar pandemi ini segera selesai, sehingga siswa-siswa bisa kembali mendapatkan keteladanan melalui pendidikan tatap muka. “Saya belum berani mengatakan kapan pendidikan dengan sistem tatap muka. Karena zona di Kota Cilegon

ini ternyata masih merah dan belum mengarah ke orange, bahkan ada kemungkinan mengarah ke hitam,” pungkas Mujib.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak kecuali patuh pada aturan yang ditetapkan pemerintah, meskipun di satu sisi PJJ telah menghilangkan rasa keramahmataman di dunia pendidikan.

“Kami tidak bisa berbuat banyak, kami patuh pada aturan, kami menerapkan prokes, meskipun kami sadari pembelajaran metode daring memiliki kelemahan, dimana interaksi antara manusia dengan manusia dihilangkan,” tukas Ismatullah. ■ es



Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Cilegon. Foto: Erman/Man

# Baleg DPR Gali Masukan Terkait Implementasi UU Pangan



Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam bertukar cenderamata dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Andri/Man

**W**akil Ketua Badan Legislati (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam mengatakan, Baleg DPR RI akhir-akhir ini menggali berbagai masukan dari daerah terkait implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan yang lebih maksimal.

Hal tersebut diungkapkan Ibnu saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo beserta jajaran di Gedung Ghradika Bhakti Praja, Semarang Jawa Tengah, Rabu (27/1), guna membahas implementasi UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Jawa Tengah ini salah satu provinsi penghasil komoditas pertanian yang cukup bagus, kedatangan kami ingin mendengar dan menggali informasi secara langsung dari pemerintah daerah, terkait implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di provinsi ini,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Ia melanjutkan, perencanaan kedaulatan pangan harus dimulai dari daerah-daerah, dengan demikian Baleg DPR RI dapat mengetahui mana saja yang perlu direvisi atau di amandemen, demi tercapainya ketahanan pangan nasional.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah implementasi terkait pangan yang

diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Secara kelembagaan, ada dua lembaga yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jateng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (pergub) yakni Dewan Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan.

Ganjar juga menyampaikan berterima kasih atas kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Jateng. Menurutnya, kepedulian dari Baleg DPR RI ini adalah hal bagus bagi Pemprov Jateng. “Kepedulian teman-teman Baleg ini menurut saya ini bagus, mengingatkan kepada kita semua untuk serius melaksanakan amanat undang-undang, guna mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia” tegas Ganjar. ■ man/es

# BKSAP Gelar FGD Ekonomi Pertumbuhan Hijau dengan Para Pakar



Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fathan. Foto: Ria/Man

**P**emerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata melalui penancangan strategi perekonomian hijau. Bahkan, pemerintah telah memberikan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sejak tahun 2009 sebesar 26 persen untuk dicapai pada 2020 dengan skenario *business as usual* menggunakan sumber daya sendiri dan sebesar 41 persen untuk dicapai pada 2030 dengan dukungan internasional.

Komitmen ini ditegaskan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* yang diluncurkan pada November 2016 yang memprioritaskan empat sektor, termasuk penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), termasuk di lahan gambut.

Komitmen yang sama telah dicantumkan di dalam tiga jilid RPJMN yang menetapkan 7 agenda prioritas. Salah satunya adalah membina lingkungan dan meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap bencana alam dan iklim melalui perbaikan kebijakan lingkungan hidup, kebencanaan dan perubahan iklim, dan pertumbuhan rendah karbon. Namun, pandemi Covid-19 dan dampak berat yang ditimbulkannya terhadap perekonomian membuat RPJMN membutuhkan penyesuaian besar.

Berdasarkan konteks tersebut, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* atau diskusi kelompok terpusat (DKT) untuk menghimpun pandangan dan menajajaki peluang bagi peran parlemen yang lebih aktif, khususnya pandangan

dari sisi keuangan tentang kinerja pemerintah dalam pertumbuhan hijau.

“Beberapa hal yang diangkat adalah situasi terkini agenda pertumbuhan hijau Indonesia, kemajuan dalam mencapai target emisi GRK (gas rumah kaca), penggunaan sistem neraca ekonomi dan lingkungan (SEEA) oleh pemerintah dan potensi SEEA digunakan sebagai alat pengawasan keuangan oleh DPR, khususnya BAKN. FGD juga bertujuan mengetahui praktik dari parlemen lain, termasuk PAC dari *House of Commons* di Inggris,” ungkap Anggota BKSAP DPR RI Fathan di sela-sela FGD di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/1).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, diperlukan sebuah langkah konkret dan terukur dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan sumberdaya alam dan pertumbuhan ekonomi hijau. “Kami akan mengawasi kebijakan dan sumber daya untuk mengubah ekonomi kita dengan cara yang paling ramah lingkungan,” kata Fathan.

Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menyampaikan apa yang dibutuhkan dunia sekarang adalah sebuah model ekonomi yang lebih berkesinambungan dan komprehensif secara sosial dan adil. “Kegiatan ekonomi harus beralih ke pelestarian, bukan menghabiskan sumber daya alam yang terbatas,” katanya.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, pembangunan berkelanjutan dengan mengusung konsep pertumbuhan hijau memerlukan peran aktif dan kerja sama dari pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi dan masyarakat lokal. ■ rnm/sf

# Subsidi Energi Harus Permudah Akses Kelompok Miskin

**K**ebijakan subsidi energi yang selama ini berjalan masih menuai banyak masalah. Kelompok miskin masih sulit mengakses bantuan subsidi energi seperti BBM, listrik, dan elpiji. Saatnya, memastikan kemudahan akses bagi kelompok miskin dalam mengakses subsidi energi.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengemukakan hal ini saat menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cirebon, di Cirebon, Jawa Barat, Senin (1/2). Kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan sosial.



Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya.  
Foto: Husen/Man

”

**KETIMPANGAN DALAM PENGALOKASIAN SASARAN PENERIMA SUBSIDI ENERGI YANG TERUS BERULANG MERUPAKAN PERMASALAHAN YANG HARUS KITA SELESAIKAN BERSAMA**

Selalu ada anomali, kata legislator asal Palembang ini, dalam praktik subsidi. Kelompok yang disasar kebijakan subsidi selalu saja mengalami disorientasi dan jatuh ke kelompok yang tidak berhak menerima subsidi. “Ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan bersama,” imbuh Wahyu.

Perlu ada penelaahan secara menyeluruh, sambung politisi Fraksi Partai Demokrat ini, dengan pihak-pihak terkait. Dimulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, badan usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan kelompok masyarakat sebagai pengguna subsidi energi. Disampaikannya, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari Rp100 triliun setiap tahun.

Dalam APBN tahun 2021 saja, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp110.512,2 miliar yang terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu, elpiji tabung 3 kg sebesar Rp56.924,9 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp53.587,3 miliar. “Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Wahyu melanjutkan, rerata pengeluaran subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari

PDB

per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makro ekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan. “Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga pemerataan akses ekonomi dan pembangunan,” ujar Wahyu. ■ mh/sf



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti bersama Tim Kunker BURT bertukar cenderamata dengan manajemen Omni Hospital Group Tangerang. Foto: Arief/Man

# BURT Pantau Layanan Jamkestama di Omni Hospital Tangerang

**B**adan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Omni Hospital Tangerang, Banten. Tinjauan ini merupakan bagian dari pengawasan DPR RI juga untuk melihat dari dekat rumah sakit *provider* yang menyediakan layanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) untuk para Anggota DPR RI dan keluarganya.

Ditemui usai pertemuan dengan manajemen Omni Hospital Group, Tangerang, Banten, Jumat (29/1), Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan rumah sakit *provider* dalam memberikan layanan terbaik bagi Anggota Dewan sebagai pejabat negara. “Tim BURT DPR RI mengunjungi rumah sakit Omni Tangerang, di mana ini adalah

salah satu rumah sakit rujukan dari Jamkestama,” kata Novita.

Politisi Fraksi Gerindra menerangkan di Omni Hospital Tangerang ini, selain bisa menerima pasien BPJS Kesehatan, lingkungan pengembangannya

sangat bagus. Sehingga memang tidak salah jika pihak PT Jasindo sebagai mitra dari DPR RI menjadikan Omni Hospital sebagai rujukan bagi pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkestama.

Di samping itu, Novita menjelaskan, dalam menangani pasien di masa pandemi, pihak Omni Hospital tetap menegakkan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Omni Hospital juga siap melayani jika ada masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi mandiri.

“Ke depannya Omni Hospital akan menjadi rumah sakit vaksin untuk mandiri. Tetapi masih menunggu bagaimana ketentuan dari pemerintah. Dari informasi yang kami dapat, Omni Hospital selalu memberikan sosialisasi dan mengajak agar selalu menerapkan prokes,” pungkas Novita. ■ afr/es

”

**DARI INFORMASI YANG KAMI DAPAT, OMNI HOSPITAL SELALU MEMBERIKAN SOSIALISASI DAN MENGAJAK AGAR SELALU MENERAPKAN PROKES**

# Sejumlah RS 'Provider' Belum Layani Peserta Jamkestama dengan Baik



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI yang dipimpin Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso dengan direksi RS Siloam Cirebon. Foto: Arief/Man

**K**etua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menilai sejumlah rumah sakit (RS) *provider* yang ditunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) belum memberikan layanan terbaiknya kepada para peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya.

Hal ini disampaikan Agung saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direktur beserta jajaran manajerial dan tenaga medis Rumah Sakit Siloam Cirebon, di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (2/2). Salah satu penyebabnya, jelas Agung, adalah kurang sosialisasi kepada RS *provider* tersebut. Banyak Anggota DPR masih mengeluhkan layanan di RS yang ditunjuk Jasindo.

“Salah satu kasus yang sering terjadi, Anggota DPR RI mendapat pelayanan yang kurang memadai. Hal ini disinyalir karena Program Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perpres dan Permenkeu tersebut belum tersosialisasikan dengan baik kepada RS *provider*,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Faktor penyebab lainnya, lanjut Agung, masih terdapat beberapa RS *provider* belum memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan pelayanan berstandar VVIP. Di sinilah BURT bertugas memantau sejumlah RS yang ditunjuk untuk melihat dari dekat, bagaimana layanan dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki RS.

“Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk memastikan bahwa

pelaksanaan Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka BURT perlu melakukan peninjauan secara langsung terhadap pelaksanaan program dimaksud,” tegas Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Agung menambahkan, BURT DPR RI aktif memantau semua RS *provider* ke sejumlah daerah. Pantauan ini penting agar tak ada keluhan dan pengaduan lagi dari para Anggota Dewan terhadap program Jamkestama. “Melalui kunjungan kerja ke rumah sakit *provider* ini diharapkan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarga dapat lebih tersosialisasi dengan baik,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I itu. ■ afr/sf



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat penetapan Anggota DPR RI Dolfie O.F.P dari Fraksi PDI-Perjuangan sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menggantikan Eriko Sotardjaga, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2). Foto: Eno/Man



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Wahyu Sanjaya sebagai Ketua BAKN DPR RI menggantikan Marwan Cik Asan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/2021). Foto: Mentari/Man

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat penetapan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI menggantikan I Gusti Agung Rai Wirajaya, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2). Foto : Oji/Man



Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul dan Kepala PKAKN BK DPR RI Helmizar menghadiri kegiatan konsinyering antara PKAKN BK DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (27/1). Foto: Taufan/Man